



## **LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KE PROVINSI PAPUA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2010-2011 TANGGAL 22 – 25 MARET 2011**

Komisi IX DPR RI yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Kependudukan, sesuai tugas dan fungsi Pengawasannya, telah melakukan Kunjungan Spesifik pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2010 - 2011 Provinsi Papua yang dilaksanakan pada tanggal 22 - 25 Maret 2011.

Adapun tujuan Kunjungan Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Papua adalah menyangkut terhentinya kegiatan pelayanan di RSUD Dok II Jayapura menyusul aksi mogok kerja ratusan perawat dan bidan RSUD Dok II Jayapura - Papua.

Kunjungan Spesifik ke Provinsi Papua dilaksanakan oleh :

1. H. Mamat Rahayu Abdullah Anggota DPR RI No. A - 202 dari Fraksi Partai Golkar
2. Jamaluddin Jafar,SH Anggota DPR RI No. A - 146 dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

### **I. Pendahuluan**

Permasalahan yang menjadi tuntutan Ratusan perawat dan bidan RSUD Dok II Jayapura menggelar aksi unjuk rasa dan mogok kerja, antara lain:

1. Soal SK PERMENKES 2007 mengenai Insentif Paramedis.
2. Soal SK PERGUB No.125 tahun 2010, mengenai kebijakan pemprov Papua yang menolak membayar dana insentif selama Januari - Desember 2010 senilai Rp. 16 miliar.
3. Mendesak Kapolda Papua untuk segera membebaskan 5 perawat dan bidan RSUD yang ditahan.

### **II. Hasil Pertemuan**

1. Dengan Pemda RSUD.
  - a. Pemda telah mengakui SK Gubernur tentang insentif bagi perawat melanggar aturan apabila diberlakukan.
  - b. Pemda akan melakukan koordinasi dengan Kapolda Papua untuk meminta membebaskan para perawat yang ditahan.

2. Dengan Para Perawat.
  - a. Mereka kembali bekerja dengan normal
  - b. Mereka memahami SK Gubernur tersebut
  - c. Mereka tetap mengharap suatu waktu dapat insentif (tentatif)
  - d. Mengharapkan pembebasan kepada 5 teman perawat yang ditahan.

### III. Kesimpulan

- a. Para perawat bekerja kembali secara rutin.
- b. Pemda telah mengakui SK Gubernur tentang insentif bagi perawat melanggar aturan apabila diberlakukan dan akan mencari formulasi untuk masalah tersebut.
- c. Kapolda akan berkoordinasi dengan pihak gubernur untuk meminta supaya para tahanan dibebaskan atau ditangguhkan.

Jakarta, 28 Maret 2011

Pelapor,

  
**( H. Mamat Rahayu Abdullah )**  
Anggota DPR RI A-202

  
**( Jamaluddin Jafar, SH )**  
Anggota DPR RI A-146